

# Arsitektur Perilaku : Desain DPRD Bojonegoro

Arcadius Mahatma Nuragadikara, dan Wawan Ardiyan Suryawan

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia

*e-mail*: wawan@arch.its.ac.id; wawanardyan.arch@gmail.com

**Abstrak**— Kinerja aparat pemerintah negara sebagai wakil rakyat masih dirasa tidak optimal. Banyaknya kasus yang menimpa para wakil rakyat semakin membuat masyarakat ragu dan kehilangan kepercayaan akan aparatur negara. Tidak hanya pada skala pemerintahan pusat saja yang menjadi sorotan masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah (Pemkab / Pemkot). Kurangnya tingkat produktivitas kerja serta transparansi para wakil rakyat daerah ini kerap kali menjadi pertanyaan besar. Kelakuan buruk oknum wakil rakyat ditambah dengan kinerja yang terkesan asal-asalan menjadi lubang hitam bagi citra wakil rakyat. Dengan metode desain yang tepat, sebuah arsitektur mampu menjadi jalan keluar atas permasalahan ini. Pendekatan berdasarkan pola dan kebiasaan kerja, yang dimainkan sedemikian rupa, dapat meningkatkan produktivitas dan transparansi para wakil rakyat. Suasana kantor dan bentuk arsitektural yang baik mampu menunjang terciptanya kondisi kondusif kerja. Objek rancang bertujuan untuk menghasilkan desain bagi kantor pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada kinerja para wakil rakyat. Menonjolkan aspek transparansi serta produktivitas kerja sehingga terbangun kembali kepercayaan pada para wakil rakyat.

**Kata Kunci**—Arsitektur Perilaku, Produktivitas, Transparansi, Wakil Rakyat.

## I. PENDAHULUAN

**B**ANYAK dari kita yang sering bersungut – sungut dan mengutuk kinerja para oknum anggota DPRD yang tidak sesuai dengan harapan bagaimana semestinya wakil rakyat bekerja. Profesi sebagai anggota dewan dipandang sebagai pencitraan belaka dan sandiwara politik yang tidak pernah memiliki keberpihakan pada rakyat. Lalu adakah patokan tipikal sistem pemerintahan yang baik? Apakah hanya dengan sistem pemerintahan yang baik pasti mampu menjamin kinerja para wakil rakyat juga menjadi baik? Ataukah ada faktor lain, diluar sistem, yang menjadi faktor penentu kinerja wakil rakyat?

Good Governance adalah tipikal sistem tatanan pemerintahan yang sehat dengan kualitas yang baik. Terdapat 8 kriteria seperti gambar dibawah. Diantara kedelapan kriteria ini, tranparansi dan kinerja efektif serta efisien adalah isu utama yang sangat perlu untuk diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

Sistem yang baik dapat menjadi salah satu pemicu terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Tetapi hal ini harus diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai

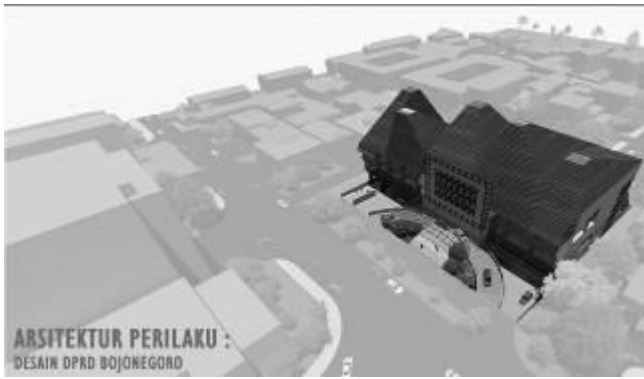
pula, agar sistem tidak hanya menjadi sebuah sistem belaka, tetapi mengakar dan menyatu dengan etos kerja para wakil rakyat. Pertanyaan selanjutnya, apakah fasilitas yang mereka terima telah seluruhnya sesuai untuk menunjang kinerja ideal Good Governance? Fasilitas seperti apa dan bagaimanakah yang dimaksud?

Menurut literatur Sign, Symbol, and Architecture serta Psychology and The Built Environment [3] dan [4], sebuah desain arsitektur mampu menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan sesuatu dan merangsang orang untuk merespon hal tersebut. Arsitektur yang mewedahi kegiatan manusia tanpa disadari mampu merubah pola pikir, kebiasaan, serta psikologis pengguna karena memberikan rangsangan yang sama setiap hari (dari segi bentuk, material, program ruang, sirkulasi, dan lainnya), secara terus menerus. Dengan desain yang tepat, transparansi dan efektivitas, efisiensi kerja dapat dicapai.

Didukung pula dengan kenyataan bahwa mayoritas desain gedung kantor pemerintahan, terutama kantor DPRD saat ini hanya menitikberatkan pada penonjolan aspek identitas daerah. Dapat dilihat pada maraknya permainan bentuk atap daerah yang diangkat sebagai tanda jati diri tetapi kurang memikirkan bagaimana caranya mewedahi dengan benar aktivitas manusia yang berada didalamnya. Tubuh yang serupa, dengan topi unik yang berbeda. Citra yang baik seolah hanya ditampilkan dari kulitnya saja tanpa memberi aksi nyata kinerja yang baik pula. Konsep Good Governance yang diusung dan diidamkan pun belum tercapai.

Mengapa Bojonegoro? Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini sedang berencana untuk membangun gedung DPRD baru, karena gedung yang lama dirasa sudah tidak mampu mewedahi jumlah dan aktivitas pengguna. [7]

Kabupaten Bojonegoro terpilih untuk mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang “Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Pemerintah Bojonegoro menjadi salah satu percontohan pemerintah daerah terbuka pertama di Asia, bersama dengan Seoul (Korea Selatan) dan Tbilisi (Georgia). Dimana dalam prosesnya pemerintah sangat membuka diri bagi opini publik dan juga pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat. Didorong untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan berinovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerahnya. [8]



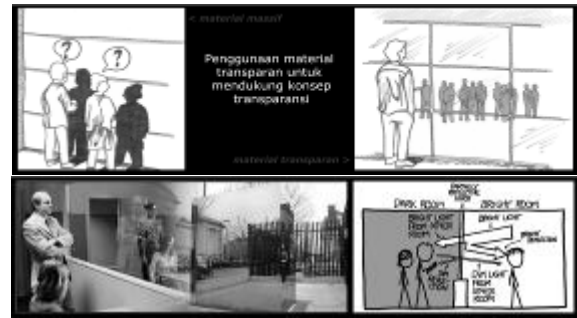
Gambar 1. Desain DPRD Bojonegoro



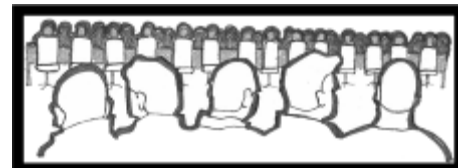
Gambar 2. Kriteria Good Governance  
 Sumber : <http://whatways.com/good-governance/>



Gambar 3. Eksplorasi awal desain



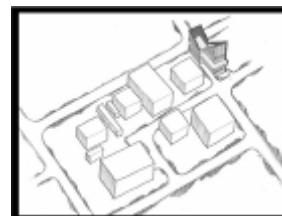
Gambar 4. Konsep material



Gambar 5. Konsep partisipasi masyarakat sebagai pengontrol



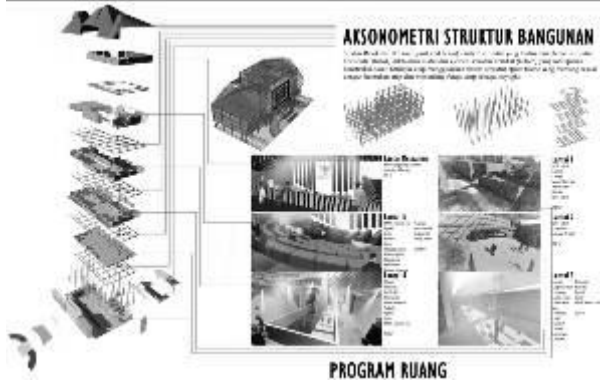
Gambar 6. Konsep suasana ruang



Gambar 7. Konsep Ikonik



Gambar 8. Konsep Demonstrasi



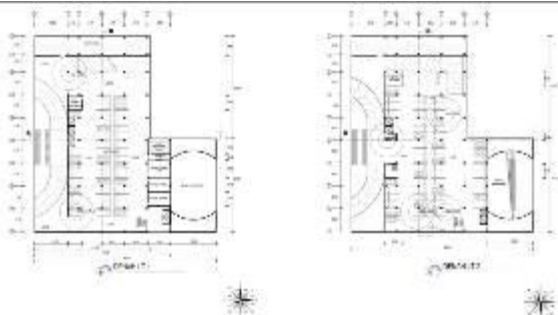
Gambar 9. Aksonometri Struktur dan Program Ruang Bangunan



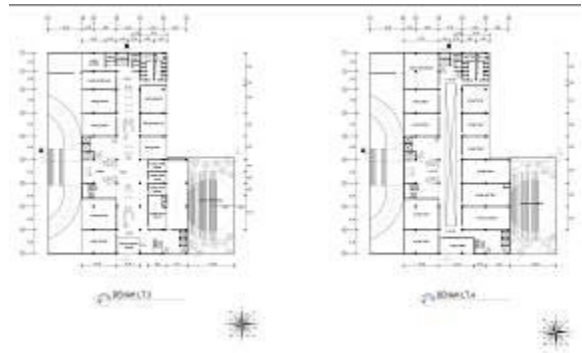
Gambar 10. Konsep Fasad & Atap



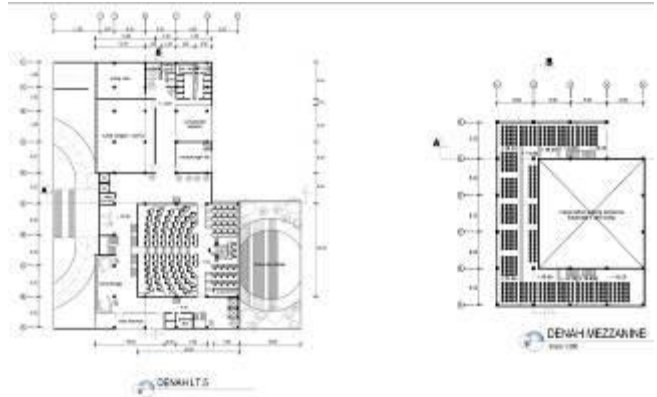
Gambar 11. Perspektif Interior dan Penerapan Konsep Terbuka



Gambar 12. Denah lantai 1 & 2



Gambar 13. Denah lantai 3 & 4



Gambar 14. Denah lantai 5 & Mezzanine



Gambar 15. Tampak Depan & Samping Kanan

## II. EKSPLORASI DAN PROSES RANCANG

Eksplorasi desain diawali dengan mempertanyakan hal paradoks terkait tipikal kantor dan skema ruang yang mempertimbangkan aspek psikologis pengguna bangunan. Hal ini dilakukan agar mendapat patokan detail desain untuk dikembangkan lebih lanjut.

Apakah sebuah desain kantor akan lebih nyaman apabila ruangnya terasa “kosong” atau kompleks dan penuh? Luasan yang sempit ataukah yang luas? Ruang dengan efisiensi yang besar ataukah terdapat ruang – ruang personal yang sangat lega? Selasar penghubung yang sempit atau lebar? Lurus atau berkelok? Pencahayaan yang gelap, remang, atau terang? Tembok pembatas masif atau transparan? Langit – langit yang tinggi dan megah atau pendek namun hangat? Suasana interior yang formal atau non – formal? Semua dipikirkan di awal proses merancang untuk mendapatkan patokan baru yang benar – benar sesuai

dengan apa yang dibutuhkan dan memang dapat mempengaruhi psikologis pengguna. Penataan interior dan suasana ruang, dipadukan dengan detail arsitektural dan fokus pada keadaan psikologis pengguna bangunan membuat proses rancangannya unik dan tepat guna bagi kebutuhan yang akan dicapai.

Tekanan pekerjaan yang berat dan terus – menerus, ditambah dengan suasana ruang yang tertutup dan monoton berimbas pada perasaan jengah, tidak fokus, dan kurang produktif dalam bekerja. Gambar 6 menjelaskan perbandingan antara kondisi kerja pada suasana tertutup dan terbuka. Konsep ikonik dijelaskan pada gambar 7, dimana berdasarkan analisa lahan dan bangunan sekitar, desain kantor DPRD Bojonegoro berpotensi menjadi landmark daerah sekitar. Potensi desain ikonik menjadi efek berantai yang mampu memicu kinerja anggota DPRD Bojonegoro. Ketika desain menjadi perhatian banyak orang, maka kinerja para wakil rakyat di dalamnya juga akan disoroti, hal inilah yang akan menjadi pelecut semangat kerja efektif, efisien, dan transparan. Fungsi gedung DPRD seyogyanya tidak lepas dari aspek demonstrasi. Hal ini menjadi pengaplikasian demokrasi dan kebebasan berpendapat rakyat. Pada gambar 8 dijelaskan pemilihan ruang bagi masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi sehingga meminimalisir perilaku anarkis, dan tidak mengganggu kinerja anggota dewan.

### III. HASIL RANCANGAN

Perspektif eksterior pada gambar 11 menunjukkan hasil rancangan, dan situasi dengan lahan sekitar lahan. Penerapan konsep – konsep untuk menunjang terciptanya efektifitas, efisiensi, dan transparansi kinerja terlihat pada interior dan eksterior bangunan dimana desain kantor ini tidak hanya akan menjadi tempat kerja, tetapi lebih dari itu, wadah para wakil rakyat mengabdikan, meneruskan aspirasi rakyat, serta membantu memajukan daerah Bojonegoro. Sense of belonging para wakil rakyat dikedepankan lewat desain kantor tempat mereka bekerja, karena ketika para anggota DPRD Bojonegoro benar – benar merasa memiliki ikatan pada daerah yang dipimpinnya, maka perilaku negatif yang akan membuat kota Bojonegoro mengalami kemunduran pasti dapat diminimalisir.

### IV. KESIMPULAN / RINGKASAN

Desain DPRD Bojonegoro dapat menjadi behaviour modifier bagi penggunaannya (anggota DPRD Bojonegoro), untuk bekerja dengan lebih efektif, efisien, sehingga aspek transparansi hasil kinerja dapat tercapai. Hal ini dicapai dengan permainan material, pola ruang dan bentuk desain yang disesuaikan dengan aspek psikologis pengguna..

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Duerk, P. Donna, *Architectural Programming : Information Management for Design*. New York. Van Nostrand Reinhold, 1993
- [2] Ernst, Neufert, *Data Arsitek*, Jakarta , Erlangga, 1999
- [3] Broadbent Geoffrey, Richard Bunt, Thomas Liorens, *Sign, Symbol & Architecture*, The Pitman Press, Bath, 1980
- [4] Center David & Lee Terence, *Psychology and the Build Environment*, 1974
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011
- [6] White, Edward, *Site Analysis : Diagramming Information for Architectural Design*, 2004
- [7] Antara Jatim. 2015. Pemkab Bojonegoro berencana bangun gedung DPRD. Available : <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/162871/pemkab-bojonegoro-berencana-bangun-gedung-dprd>. Diakses pada 27 Oktober 2015
- [8] Opengovindonesia. 2015. Bojonegoro terpilih sebagai percontohan pemerintah daerah terbuka. Available : <http://opengovindonesia.org/berita/siaran-pers-bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-open-government-partnership/>. Diakses pada 13 November 2015